

The Impact of Chinese Political Movements in The Unification of Chinese Congregations in West Java 1926-1940

Yogi Fitra Firdaus 

Program Studi Magister Filsafat Keilahian, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Indonesia
yogifitra.firdaus@gmail.com

Abstract: This article aims to examine the impact of Chinese political movements on the unification of Chinese congregations in West Java. There has been an assumption that the independence of Chinese congregations is solely a gift from Dutch zending, when in fact it was born from the awareness of Chinese Christian leaders due to the influence of Chinese nationalism. The political movement among the Chinese community in West Java was a response to the discriminatory policies of the Dutch East Indies Government in both the socio-economic and educational fields. At this time, the Chinese community itself was divided into political factions according to their respective orientations. Some were oriented towards mainland China, the Dutch East Indies Government or participated in the Indonesian independence efforts. This situation of division also occurred among Chinese congregations in West Java with Calvinist and Methodist characteristics. This prompted Chinese Christian leaders to seek independence and unity. Thus, the author uses a historical method with four steps, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography to document the influence of Chinese nationalism on efforts to unite Chinese congregations in West Java in 1926-1940.

Research Highlights:

- This study describes the dynamics of the Chinese political movement among the Chinese community in West Java and its influence on Chinese congregations in the early twentieth century.
- The author points out that the independent and unification efforts of Chinese congregations were a manifestation of Chinese nationalism.
- The disintegration of Chinese congregations in West Java was not only caused by denominational differences, but also by differences in political orientation.

Article history

Submitted 29 July 2023

Revised 28 April 2024

Accepted 29 April 2024

Keywords

Chinese Congregations;
Church Unification; Chinese
Political Movement

© 2024 by author.

Licensee *Veritas: Jurnal
Teologi dan Pelayanan*.

This article is licensed under
the term of the Creative
Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike
4.0 International



Scan this QR
code with
your mobile
devices to
read online

Dampak Gerakan Politik Tionghoa Pada Upaya Penyatuan Jemaat-Jemaat Tionghoa di Jawa Barat 1926-1940

Yogi Fitra Firdaus 

Program Studi Magister Filsafat Keilahian, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Indonesia
yogifitra.firdaus@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari gerakan politik Tionghoa dalam upaya penyatuan jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat. Selama ini ada anggapan bahwa kemandirian jemaat-jemaat Tionghoa semata-mata pemberian *zending* Belanda, padahal sesungguhnya lahir dari kesadaran tokoh-tokoh Tionghoa Kristen akibat pengaruh dari nasionalisme Tiongkok. Gerakan politik di kalangan masyarakat Tionghoa di Jawa Barat sebagai respons atas kebijakan diskriminatif dari Pemerintah Hindia Belanda baik pada bidang sosial-ekonomi maupun pendidikan. Di masa ini, masyarakat Tionghoa sendiri terpecah di dalam faksi-faksi politik sesuai dengan orientasinya masing-masing. Ada yang berorientasi ke daratan Tiongkok, Pemerintah Hindia Belanda atau ikut dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Situasi perpecahan tersebut terjadi juga terjadi di kalangan jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat yang bercorak Calvinis dan Methodist. Hal ini mendorong tokoh-tokoh Kristen Tionghoa mengupayakan akan kemandirian serta kesatuan. Maka, penulis menggunakan metode sejarah dengan empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi untuk mendokumentasikan pengaruh nasionalisme Tiongkok terhadap upaya penyatuan jemaat Tionghoa di Jawa Barat pada tahun 1926-1940.

Kata-kata kunci: Gereja Tionghoa; Penyatuan Gereja; Gerakan Politik Tionghoa

PENDAHULUAN

Gerakan politik Tionghoa di awal abad ke-20 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari catatan sejarah Indonesia. Diawali dengan terbentuknya organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) di Batavia pada tahun 1900 yang dipicu atas perlakuan diskriminatif Pemerintah Hindia Belanda kepada masyarakat Tionghoa, salah satunya pada bidang pendidikan. Oleh sebab itu di dalam anggaran dasarnya, tujuan pendirian dari organisasi ini adalah untuk *“Bikin madjoe istiadat bangsa Tjina, saboleh boleh dengan menoeroet atoerannja Nabi Khong Hoe Tjoe serta tiada bersalah dengan adat sopan, dan lagi aken bikin madjoe antara bangsa Tjina pengetahoean atas hal soerat-soe-*

*rat dan bahasa-bahasa.”*¹ Maka sebagai upaya untuk mewujudkan cita-citanya itu, THHK mendirikan sekolah-sekolah berbahasa Mandarin dan Inggris di berbagai kota seperti Batavia, Bogor, Bandung, Tegal, Semarang, Yogyakarta, Probolinggo, Kediri, Belinyu, Medan, dan kota-kota lainnya di wilayah Hindia Belanda. Dalam kurun waktu 8 tahun, lembaga pendidikan yang dikelola oleh THHK ini berkembang dengan pesat, hingga tahun 1908 telah berdiri 95 sekolah dengan total 5.500 orang siswa.²

Menurut Leo Suryadinata, gerakan politik Tionghoa di Hindia Belanda ini didorong oleh bangkitnya semangat *“Pan-Cinaisme”* dalam

¹Nio Joe Lan, *Riwajat 40 Taon Dari Tiong Hoa Hwe Koan-Batavia (1900-1939)* (Batavia: THHK, 1940), 21.

²Hari Poerwanto, *Cina Khek Di Singkawang* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 60.

diri kaum Peranakan Tionghoa.³ Kala itu sebagian masyarakat Peranakan Tionghoa di Pulau Jawa mulai mengidentifikasi diri sebagai bagian dari negeri Tiongkok. Para pendukung gerakan ini beranggapan bahwa Tiongkok adalah pelindung masyarakat Tionghoa di perantauan, sehingga mereka harus menjalin hubungan yang erat dengan tanah leluhur. Hal ini dapat dilihat juga dalam pendirian Siang Hwee atau kamar dagang di Semarang pada tahun 1907. Donald Willmott menyoroti bahwa Siang Hwee tidak hanya berfungsi sebagai kamar dagang tetapi juga menjadi penghubung antara Hindia Belanda dengan daratan Tiongkok. Dalam banyak aktivitasnya organisasi ini tampak berperan penting dalam meningkatkan patriotisme di kalangan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Siang Hwee yang tersebar di banyak kota besar itu, turut menaruh perhatian pada pendidikan anak-anak Tionghoa dengan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi THHK.⁴

Gerakan politik yang berlangsung hingga pertengahan abad ke-20 ini membawa tokoh-tokoh Peranakan Tionghoa akan kesadaran pada tiga isu utama yakni pendidikan, ekonomi dan status kewarganegaraan mereka. Terlebih setelah Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan *Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap* (WNO) atau undang-undang kekawulaan Belanda tahun 1910.⁵ Undang-undang tersebut diresponi secara beragam oleh tiga faksi dalam tubuh masyarakat Tionghoa yaitu Sin Po yang berorientasi kepada daratan Tiongkok, Chung Hua Hui yang berorientasi kepada Pemerintah Hindia Belanda dan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang berorientasi kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Bangkitnya kesadaran politik di kalangan masyarakat Tionghoa ini ternyata tidak hanya

berimbas pada persoalan sosial tetapi juga kehidupan *bergereja* di antara jemaat-jemaat Kristen Tionghoa di Jawa Barat. Chris Hartono menegaskan bahwa arah berorganisasi jemaat-jemaat Tionghoa pada awal abad ke-20 turut ditentukan oleh situasi politik yang terjadi kala itu.⁶

Jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat menjadikan periode kebangkitan nasionalisme Tionghoa ini sebagai momentum pencarian identitas serta bentuk *bergereja* mereka. Segala dinamika yang terjadi dalam perumusan tata organisasi dari mulai pembentukan Bond Kristen Tionghoa (BKT) hingga Gereja Tionghoa Serikat (GTS) terkait erat dengan kadar nasionalisme Tiongkok yang dimiliki oleh masing-masing jemaat. Demikian juga dengan lahirnya keragaman sinode gereja berlatar etnis Tionghoa ini, pada awalnya bukan semata-mata karena perbedaan warna teologi atau badan misi yang merintisnya tetapi banyak pula dipengaruhi oleh persoalan politik.

Meskipun sangat berpengaruh terhadap perjalanan sejarah jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat, dampak dari pergerakan politik Tionghoa ini masih belum banyak dibahas sebagai bagian dari kajian sejarah kekristenan di Indonesia. Dalam pengamatan penulis baik di dalam buku-buku sejarah gereja di Indonesia maupun artikel-artikel di jurnal akademik, sejarah gereja Tionghoa di Indonesia khususnya dalam bingkai sosial politik masih jarang diteliti. Maka untuk memahami dampak pergerakan politik Tionghoa terhadap upaya keesaan jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat tahun 1926-1940 melalui artikel ini penulis akan mengkaji secara naratif deskriptif latar belakang pergerakan politik Tionghoa, situasi jemaat-jemaat Tionghoa pada awal abad ke-20, proses dan dinamika dalam upaya keesaan jemaat-jemaat Tionghoa serta dampak yang

³Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), 43.

⁴Donald E. Willmott, *The Chinese of Semarang* (Ithaca: Cornell University, 1960), 101.

⁵Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda secara otomatis menjadi

warga negara Belanda. Lih. Leo Suryadinata, *Politik Peranakan Tionghoa Di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), 41.

⁶Chris Hartono, *Dari Cipaku Sampai Jakarta: Sejarah Singkat Upaya-Upaya Keesaan Dari Pembentukan Bond Kristen Tionghoa Sampai Pembentukan Sinode Am Gereja Kristen Indonesia* (Jakarta: Grafika Kreasindo, 2017), 20–21.

timbul dari upaya penyatuan jemaat-jemaat Tionghoa tersebut.

Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah tidak hanya berfungsi untuk merekonstruksi kisah-kisah di masa lalu melainkan juga sebagai ruang edukasi.⁷ Bagi penulis, dengan diangkatnya narasi tentang tokoh, dinamika serta peristiwa dalam sejarah dapat ditarik nilai-nilai pembelajaran bagi kehidupan gereja saat ini, sebab peristiwa sejarah di masa lalu selalu menjadi cerminan pada masa kini. Kembali menurut Kuntowijoyo, sebagai sebuah institusi sosial, lembaga keagamaan dapat menjadi bahan kajian sejarah. Sejarah lembaga keagamaan dianggap sebagai salah satu topik penting dalam historiografi Indonesia tetapi belum mendapatkan banyak perhatian.⁸ Dengan demikian penulis berharap artikel ini dapat berkontribusi terhadap khazanah historiografi sejarah kekristenan di Indonesia melalui pendekatan sejarah sosial dan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melakukan empat langkah yaitu:

1. Heuristik, mengumpulkan sumber-sumber primer berupa dokumen dan surat kabar seperti *Maanblad Kristen Tionghoa* edisi 15 Agustus 1928, *Koran Kengpo* 17 Juli 1934, *Verlsag Conferentie* Kristen Tionghoa di Cheribon, *Orgaan Der Nederlandsche Zending-svereniging* dan *Minutes of The Malaysia Annual Conference of The Methodist Episcopal Church*. Selain itu penulis menggunakan sumber buku yaitu *Java and Its Challenge* (Elizabeth Harper Brooks, 1911) dan *Sumber-sumber Zending Tentang Sejarah Gere-*

ja di Jawa Barat 1858-1963 (Th. van den End, 2006).

2. Kritik, menentukan kredibilitas serta keaslian sumber.
3. Interpretasi, menafsirkan setiap fakta-fakta sejarah.
4. Historiografi, menuliskan hasil penelitian dengan memperhatikan seleksi dan kronologis.⁹

Penulis juga perlu memberikan catatan bahwa minimnya tulisan-tulisan kontemporer berupa artikel jurnal mengenai topik ini yang terbit sepuluh tahun terakhir. Sehingga penulis lebih banyak menggunakan dokumen-dokumen badan *zending* sebagai sumber primer penelitian dalam kajian historis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi sosial Masyarakat Tionghoa di Jawa Barat abad Ke-20

Memasuki abad ke-20, masyarakat Tionghoa di Jawa Barat mengalami pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Jika pada tahun 1815 terdapat 58.178 jiwa di lima wilayah yaitu Karesidenan Bantam (Banten), Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), Priangan (Bandung, Cianjur, Garut, Tasik, dsb.) dan Cheribon (Cirebon) maka pada tahun 1920 jumlahnya naik hampir tiga kali lipat menjadi 167.751 jiwa. Mayoritas mereka tinggal di wilayah Batavia yang telah menjadi konsentrasi penduduk Tionghoa sejak abad ke-16.¹⁰

Pertambahan jumlah penduduk Tionghoa di Jawa Barat ini juga diakibatkan oleh migrasi orang-orang Tiongkok ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan istilah Totok. Kedatangan masyarakat Tionghoa pada abad ini lebih bersifat berkelompok dengan membawa serta istri, anak dan anggota

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 2005), 43.

⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 2nd ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 166.

⁹ Nina H. Lubis, *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2018).

¹⁰ Data sensus penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930, secara lebih detail sebetulnya sensus tersebut membagi masyarakat Tionghoa berdasarkan suku bangsanya seperti Hokkian, Hakka, Tiociu, dsb, lih. "Volkstelling Deel I: Inheemsche Bevolking van West Java," 1933, 164-66.

keluarga lainnya. Selain itu kelompok ini cenderung mempertahankan budaya dan bahasa mereka seperti di daratan Tiongkok karena alasan utama kedatangan mereka ke Hindia Belanda adalah untuk mencari penghidupan sementara waktu, maka ketika kelak mereka berhasil memperbaiki kondisi perekonomian, orang-orang Totok akan kembali ke negeri asalnya itu.¹¹ Hal ini yang membedakan mereka dengan Peranakan yang telah membentuk identitas baru hasil percampuran antara budaya Tionghoa dengan tradisi setempat di Pulau Jawa.

Sebagian besar masyarakat Tionghoa kala itu, baik Peranakan ataupun Totok, menilai jika Pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan kebijakan yang diskriminatif berkaitan dengan status kewarganegaraan mereka. Willmot mencatat bahwa Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan tiga kali undang-undang kewarganegaraan yaitu pada tahun 1854, 1892 dan 1910.¹² *Regeeringsreglement* atau peraturan pemerintah Art. 109/RR 1854 memuat aturan yang membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan ras mereka yakni *Europeanen* (Orang Eropa dan Indo-Eropa), *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing) dan *Inlander* (Pribumi). Masyarakat Tionghoa digolongkan ke dalam golongan *Vreemde Oosterlingen* yaitu masyarakat kelas dua bersama penduduk asal Arab, India, Moor dan orang-orang dari semenanjung Malaya (wilayah jajahan Inggris).¹³ Kebijakan tersebut telah membuat masyarakat Tionghoa berada pada situasi sebagai *middleman society* yang harus berhadapan dengan dua kelompok besar masyarakat di Hindia Belanda yakni orang-orang Eropa dan suku-suku lain yang dimasukkan ke dalam golongan pribumi.

Sejak masa kekuasaan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), masyarakat Tionghoa memang sudah dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi penguasa belaka. Mereka dijadikan sebagai pedagang perantara yang menyalurkan komoditas ekonomi dari orang-orang Belanda kepada penduduk pribumi atau sebaliknya. Mengenai hal ini Suryadinata menjelaskannya sebagai berikut:

Orang Eropa sebagai pedagang besar, importir dan eksportir berada di tempat teratas. Pribumi selaku petani, nelayan, pedagang eceran dan buruh di tempat terbawah. Sedangkan orang Tionghoa sebagai pedagang perantara yang membagi-bagikan barang berada di tengah-tengah, melayani kedua kelompok penduduk tersebut. Dari kelompok Eropa, orang Tionghoa membeli barang-barang konsumsi dan menjualnya kepada kaum pribumi dan dari kaum pribumi mereka membeli bahan mentah serta produksi lokal untuk dijual ke golongan Eropa.¹⁴

Relasi perdagangan yang saling menguntungkan ini membuat masyarakat Tionghoa seolah-olah menjadi anak emas pemerintah kolonial. Hal ini seringkali menimbulkan kecemburuan dari penduduk etnis lainnya. Padahal tak jarang Pemerintah Hindia Belanda membangun citra buruk atas masyarakat Tionghoa terutama berkaitan dengan aktivitas mindring (*minding*). Mindring adalah sistem kredit yang digunakan oleh para pedagang Tionghoa kepada penduduk pribumi baik kebutuhan barang maupun uang tunai dengan cara menarik bunga. Penarikan bunga sebenarnya dilakukan sebagai langkah antisipasi atas risiko yang bisa saja timbul karena hutang tidak dibayar atau peminjam meninggal.¹⁵

¹¹Mary F. Somers, *Peranakan Chinese Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University, 1964), 4.

¹²Masih di dalam buku yang sama disebutkan bahwa selain undang-undang kewarganegaraan, pada tahun 1911 Belanda juga menandatangani perjanjian diplomatik dengan Tiongkok mengenai status masyarakat Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda sebagai bagian dari Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda. Donald E. Willmott, *The National Status of*

The Chinese in Indonesia, 1900-1958 (Ithaca: Cornell University, 1961), 2.

¹³Mona Lohanda, *Growing Pains: The Chinese and The Dutch in Colonial Java, 1890-1942* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2002), 79.

¹⁴Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, 47.

¹⁵Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, 49.

Menurut Mona Lohanda, Pemerintah Hindia Belanda dengan sengaja menyematkan istilah “*Bloedzuiger de Javanen*” atau penghisap darah orang-orang Jawa kepada masyarakat Tionghoa yang menjalankan usaha mindring tersebut.¹⁶ Pencitraan secara negatif dari masyarakat Tionghoa juga seringkali dimunculkan dalam karya sastra yang hadir pada abad ke-19 hingga ke-20, misalkan dalam prosa *Ba-boe Dalima* tulisan M. T. H. Perelaer yang terbit tahun 1886. Pada prosa tersebut para bandar dan opsir Tionghoa digambarkan sebagai penjahat yang serakah, curang serta berperangai kejam.¹⁷

Onghokham dalam bukunya *Migrasi Cina, Kapitalisme Cina dan Anti Cina* menyebutkan bahwa masyarakat Tionghoa memang diberikan hak khusus (*pacht*) dalam melakukan monopoli perdagangan candu dan jasa pemungutan pajak.¹⁸ Pada awal tahun 1800-an bidang-bidang pemungutan pajak yang diserahkan kepada para pemborong Tionghoa meliputi pajak perdagangan garam, pajak pegadian, pajak pertunjukan wayang, pajak pemotongan hewan, pajak penyeberangan sungai, pajak usaha dalam pasar dan pajak penempatan sarang burung walet di pantai selatan Jawa. Selain monopoli candu dan pemborong pemungutan pajak, menurut Peter Carey masyarakat Tionghoa juga mendapatkan hak sewa gerbang tol di seluruh wilayah Kesultanan Mataram Islam karena dipandang sebagai sarana paling efektif bagi pemungutan pajak untuk mengisi kas pemerintah kolonial.¹⁹

Namun pada akhirnya Pemerintah Hindia Belanda membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa dengan menerapkan aturan permu-

kiman khusus bagi masyarakat Tionghoa (*wijkenstelsel*).²⁰ Sistem ini digunakan agar Pemerintah Hindia Belanda mudah mengawasi kegiatan orang-orang Tionghoa. Aturan ini pada awalnya hanya diberlakukan di Batavia, namun sejak tahun 1900 peraturan tersebut diterapkan bagi masyarakat Tionghoa di seluruh wilayah Hindia Belanda. Jika ada yang kedapatan melanggar aturan ini, mereka akan dikenakan denda senilai 25-100 gulden serta diharuskan untuk segera pindah ke kawasan permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²¹

Selain itu mulai tahun 1863 Pemerintah Hindia Belanda mengerluarkan peraturan surat izin perjalanan atau *passenstelsel*. Peraturan ini mewajibkan setiap orang Tionghoa yang akan melakukan perjalanan menuju wilayah lain untuk memiliki izin khusus dari pemerintah.²² Kebijakan ini tentunya merugikan bisnis masyarakat Tionghoa yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang perantara.

Para pejabat Belanda seringkali menyalahgunakan aturan tersebut demi kepentingan diri sendiri. Dalam penerapannya banyak pejabat yang melakukan tebang pilih, karena ada sebagian orang Tionghoa yang bebas dari aturan-aturan tersebut terutama para pemilik hak monopoli usaha dan pemborong pemungutan pajak. Mereka dibebaskan dari aturan itu dengan alasan melakukan tugas kedinasan dari pemerintah.²³ Situasi sosial masyarakat Tionghoa pada abad ke-20 ini yang menjadi pendorong pergerakan politik Tionghoa.

Kebangkitan Politik Tionghoa di Jawa Barat

¹⁶Lohanda, *Growing Pains*, 22.

¹⁷Penulis buku ini meneliti kisah pencitraan terhadap masyarakat Tionghoa di Nusantara dalam karya-karya sastra yang muncul pada abad ke-19 hingga ke-20, pencitraan tersebut seringkali hadir berkaitan dengan konteks kepentingan politik pemerintah kolonial, lih. Widjajanti W. Dharmowijono, *Bukan Takdir: Kisah Pencitraan Orang Tionghoa Di Nusantara* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2021), 315–20.

¹⁸Onghokham, *Migrasi Cina, Kapitalisme Cina Dan Anti Cina* (Depok: Komunitas Bambu, 2017), 65.

¹⁹Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825* (Depok: Komunitas Bambu, 2015), 81.

²⁰Lohanda, *Growing Pains*, 41.

²¹Lea E. Williams, *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of The Pan Chinese Movement in Indonesia, 1900-1916* (Glencoe, IL: The Free Press, 1960), 31.

²²Victor Purcell, *The Chinese in South East Asia* (London: Oxford University Press, 1965), 439.

²³Onghokham, *Kapitalisme Cina dan Anti Cina*, 64–65.

Banyak dugaan yang menyebutkan bahwa masyarakat Tionghoa selalu diprioritaskan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tetapi Lea Williams justru menilai bahwa Belanda memiliki sentimen rasial terhadap kelompok masyarakat Tionghoa. Puncak sentimen tersebut terjadi pada saat penerapan politik etis tahun 1901.²⁴ Salah satu klausul dalam politik etis adalah penyelenggaraan pendidikan terhadap masyarakat di Hindia Belanda. Oleh sebab itu pada tahun 1897 pemerintah kolonial mulai mendukung pembiayaan dalam pendirian sekolah-sekolah dengan pengantar bahasa Melayu.²⁵ Tetapi klausul pendidikan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat Tionghoa. Orang-orang Tionghoa yang ingin menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, harus memiliki kedekatan dengan pejabat Belanda seperti residen dan asisten residen. Orang-orang Tionghoa juga ditarik biaya pendidikan yang lebih mahal dari suku lainnya yaitu sekitar 10-15 gulden/bulan.²⁶

Kebijakan ini tentunya membuat masyarakat Tionghoa merasa tidak puas, apalagi mereka adalah pembayar pajak tertinggi yang memiliki andil dalam menaikkan pendapatan pemerintah kolonial. Kebijakan penarikan pajak perseorangan kepada masyarakat Tionghoa bahkan sudah diterapkan sejak masa pemerintahan Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen di Batavia tahun 1619.²⁷ Oleh sebab itu salah satu alasan Pemerintah Hindia Belanda mengangkat para Kapitan Tionghoa adalah untuk memungut pajak dari orang-orang Tionghoa tersebut.²⁸

Sebagai respons terhadap kebijakan Pemerintah Hindia Belanda pada bidang pendidikan,

maka pada 17 Maret 1900 didirikan organisasi Tionghoa Hwee Koan (THHK) di Batavia. Organisasi modern pertama di Hindia Belanda ini dipimpin oleh Phoa Keng Hek dan Lie Kim Hok yang merupakan mantan murid sekolah *zending* yang didirikan oleh S. Coolsma.²⁹ Menariknya meskipun kedua pimpinan THHK tersebut pernah menjadi murid dari utusan misi tetapi organisasi itu menggunakan ajaran Khong Hu Cu sebagai ideologinya. Oleh sebab itu kehadiran organisasi ini telah melahirkan semangat neo-Konfusianisme di Hindia Belanda.

THHK sangat memperhatikan sarana pendidikan bagi anak-anak Tionghoa di Hindia Belanda. Oleh karena itu pada 17 Maret 1901 didirikan sekolah THHK pertama di Batavia dengan Louw Koei Hong sebagai kepala sekolahnya.³⁰ Sekolah THHK di Batavia menjadi model dari pendidikan Tionghoa modern. Selanjutnya sekolah-sekolah dari perkumpulan ini berdiri di berbagai kota di Jawa. Salah satunya Sekolah THHK Mojokerto yang mulai beroperasi sejak 5 Agustus 1907.³¹

Sekolah THHK menggunakan kurikulum dari Jepang sebagai pola tandingan dari metode pendidikan Barat. Bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam kelas karena dianggap sebagai bahasa pemersatu untuk mengekspresikan etno-nasionalisme masyarakat Tionghoa. THHK juga ingin menunjukkan kepada pemerintah kolonial jika bahasa Mandarin dapat menjadi sumber alternatif dalam gerakan modernisasi.³² Kala itu bahasa Mandarin tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi bagi sesama orang Tionghoa melainkan juga sebagai alat perla-

²⁴Williams, *Overseas Chinese Nationalism*, 21.

²⁵Poerwanto, *Cina Khek Di Singkawang*, 70.

²⁶Williams, *Overseas Chinese Nationalism*, 37.

²⁷Pemerintah VOC pada saat itu menerapkan aturan pungutan pajak kepada orang Tionghoa di Batavia sebesar 9000 real/perorang, selain itu masyarakat Tionghoa masih dipungut beragam dari setiap aktivitas ekonomi dan kebudayaan yang dilakukan. Lih. Hendrik E. Niemeijer, *Batavia Masyarakat Kolonial Abad XVII* (Depok: Masup Jakarta, 2012), 62.

²⁸Mona Lohanda, *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942* (Jakarta: Djambatan, 2001), 165.

²⁹S. Coolsma merupakan seorang utusan badan misi Nederlandsche Zendingsvereeniging (NZV) yang bekerja di Bogor antara tahun 1869-1873. Lih. Suryadinata, *Politik Peranakan Tionghoa Di Jawa*, 24.

³⁰Lan, *Riwajat 40 Taon*, 21.

³¹Cindy Endriana, "Sekolah Tionghoa Hwee Kwan (THHK) Di Mojokerto Pada Tahun 1907-1942," *Avatara* 3, no. 3 (2015): 394.

³²Didi Kwartanada, "Mandarin Comes to the South Seas: The Making of Chinese Education in Early Twentieth Century Java," *Asian Culture* 42 (2018): 38.

wanan politik atas segala bentuk ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial.³³

Selain bahasa Mandarin, Sekolah THHK memilih bahasa Inggris sebagai bahasa penganatar kedua. THHK menilai bahasa Inggris jauh lebih berguna ketimbang bahasa Belanda karena sudah menjadi alat komunikasi perdagangan di wilayah Asia Timur.³⁴ Maka untuk memenuhi kebutuhan akan guru-guru berbahasa Inggris itu, mulai tahun 1910 THHK mengikat kerja sama dengan Board Foreign Mission (BFM) yang merupakan badan misi Methodist. Melalui kerja sama itu, BFM mengisi kebutuhan guru bahasa Inggris dengan menempatkan para misionarisnya, sedangkan THHK membayar gaji para guru tersebut sesuai standar gaji di Amerika. Awalnya BFM menganggap kerja sama ini akan menjadi jalan untuk penginjilan kepada para pemuda Tionghoa. Namun ternyata hal tersebut tidak berhasil karena waktu para misionaris habis untuk mengajar sedangkan para siswa lebih memilih Konfusianisme sesuai ideologi yang diusung oleh sekolah-sekolah THHK.³⁵

Di dalam bidang sosial ekonomi, gerakan politik Tionghoa didorong oleh penghapusan hak masyarakat Tionghoa dalam pengelolaan industri candu dan pegadaian. Dengan diambil alihnya dua bidang usaha tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1904, secara praktis mengguncang perekonomian sebagian orang Tionghoa.³⁶ Hal yang paling mengecewakan masyarakat Tionghoa adalah dengan ditetapkannya orang-orang Jepang sebagai penduduk yang berstatus sama dengan golongan Eropa. Kebijakan itu tentunya menyakiti hati orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda yang sama-sama berdarah Asia

Timur. Terlebih Jepang baru saja mengalahkan Tiongkok dalam “*Sino-Japanese War I.*”³⁷

Nasionalisme Tiongkok dan Faksi-Faksi pada Masyarakat Tionghoa

Sarana pendidikan yang dibangun oleh THHK tidak hanya menciptakan golongan pelajar di kalangan Peranakan Tionghoa tetapi juga membuka akses kepada perkembangan Nasionalisme Tiongkok di Jawa Barat seiring dengan kebangkitan revolusi dan gerakan modernisasi Tiongkok yang digagas oleh Dr. Sun Yat Sen pada tahun 1911. Menjelang abad ke-20, filsafat dan ilmu pengetahuan dari dunia Barat banyak yang diperkenalkan ke Tiongkok melalui penerjemahan literatur-literatur berbahasa Inggris ke dalam bahasa Mandarin.³⁸ Hal itu ternyata melahirkan golongan intelektual di kalangan pemuda Tiongkok yang menginginkan adanya gerakan kebangkitan nasional karena Dinasti Qing dianggap telah gagal membawa negeri itu pada kemajuan. Golongan ini meyakini bahwa perubahan di daratan Tiongkok tidak cukup hanya dengan mereformasi sistem tata negara feodal, tetapi perlu juga menggulingkan Dinasti Qing yang otoriter serta menggantikannya dengan sistem tata negara republik yang lebih demokratis.³⁹

Sun Yat Sen mempromosikan gerakan politiknya ini kepada diaspora Tionghoa dan menjadikan Singapura sebagai basis penyebaran ideologinya di Asia Tenggara. Sun Yat Sen selalu menganggap penting dukungan dari orang-orang Tionghoa di luar Tiongkok terutama untuk memenuhi kebutuhan

³³Didi Kwartanada, “The Tiong Hoa Hwee Koan School: A Trans Border Project of Modernity in Batavia, c. 1900s,” in *Chinese Indonesians Reassessed History, Religion and Belonging* (Abingdon: Routledge, 2013), 39.

³⁴Ayu Putri Nabila, “Sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK) Sebagai Representasi Pendidikan Modern Etnis Tionghoa Di Batavia Tahun 1901-1942,” *Mozaik Jurnal Kajian Sejarah* 12, no. 2 (2021): 170, <http://dx.doi.org/10.21831/moz.v12i2.45621>.

³⁵Richard M. Daulay, *Mengenal Gereja Methodist Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 132–33.

³⁶Onghokham, *Kapitalisme Cina Dan Anti Cina*, 65.

³⁷Willmott, *The National Status*, 3.

³⁸Liang Liji, *Dari Relasi Upeti Ke Mitra Strategis: 2000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), 426.

³⁹Liji, *Dari Relasi Upeti Ke Mitra Strategis*, 427.

dana.⁴⁰ Salah satu cara untuk menyebarluaskan gagasan politiknya itu, dibentuk grup kamar baca atau *Soe Po Sia* di Singapura. Menurut Yan Chin Hwang, pendirian *Soe Po Sia* sebetulnya terinspirasi dari komunitas pegiat literasi di kalangan orang-orang Kristen Tionghoa di Singapura yang tujuannya untuk memperkenalkan agama Kristen kepada kaum muda di sana. Tetapi pada perkembangannya baik *Soe Po Sia* maupun komunitas penggiat literasi Kristen itu berubah menjadi alat kampanye untuk menumbuhkan rasa nasionalisme serta kepedulian kepada negeri Tiongkok. Melihat keberhasilan *Soe Po Sia* di Singapura, maka Sun Yat Sen menyarankan agar para tokoh pendukung revolusi Tiongkok di wilayah lainnya untuk membangun kelompok kamar baca yang serupa.⁴¹

Revolusi di daratan Tiongkok itu mengakibatkan terjadinya polarisasi orientasi politik di antara kaum Peranakan Tionghoa di Hindia Belanda. Ada yang berorientasi kepada Tiongkok, ada yang berafiliasi kepada Pemerintah Hindia-Belanda dan ada juga yang lebih memilih untuk menyatukan diri dengan kelompok masyarakat pribumi untuk mencapai kemerdekaan.

Kelompok yang dipengarui oleh nasionalisme Tiongkok adalah Sin Po. Sin Po menyuarakan ide-idenya melalui surat kabar berbahasa Melayu yang hadir sejak tahun 1910.⁴² Kelompok ini mendorong masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda untuk meninggalkan kekawulaan Belanda dan terlibat secara aktif dalam politik Tiongkok. Salah satu tokoh ternama dari kelompok ini yaitu Tjoe Bou San, berhasil mengumpulkan 30.000 tanda tangan dari masyarakat Peranakan Tionghoa yang menolak jadi kawula Belanda.⁴³ Kalangan Sin Po tidak berhasrat untuk bekerja sama dengan Peme-

rintah Hindia Belanda serta menuntut kesetaraan dalam bidang hukum dan pendidikan.

Di bawah komando Kwee Hing Tjiat tahun 1917, Sin Po mendukung gerakan anti “*Indie Weerbar*” yang dipelopori oleh Socialistische Democratische Arbeiders Partij (SDAP).⁴⁴ *Weerbar* menjadi upaya pemerintah kolonial untuk menerapkan wajib militer bagi seluruh kawula Belanda termasuk etnis Tionghoa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi anggaran belanja pemerintah pada bidang pertahanan.

Sedangkan kaum Peranakan Tionghoa yang berorientasi ke Pemerintah Hindia Belanda adalah Chung Hua Hui (CHH) yang didirikan pada tahun 1928. Menurut Suryadinata, gerakan ini turut mendapatkan dukungan dari sebagian besar kaum intelektual Peranakan Tionghoa.⁴⁵ Jika Sin Po menganjurkan masyarakat Tionghoa untuk fokus pada politik Tiongkok, sebaliknya CHH justru mendorong orang-orang Tionghoa untuk terlibat aktif dalam Volksraad (Dewan Rakyat) bentukan pemerintah kolonial. Berbeda dengan Sin Po yang mendorong anak-anak Tionghoa untuk bersekolah di institusi milik THHK, justru CHH memilih untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda.⁴⁶

Bagi CHH relasi masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda dengan negeri Tiongkok sebatas kebudayaan yang tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Gerakan ini mendapatkan sokongan dana dari kelompok elit Peranakan Tionghoa seperti para opsir, tuan tanah dan pengusaha yang merasa aman berada di bawah perlindungan Belanda. Sikap keberpihakan CHH terhadap pemerintah kolonial terlihat dari penggunaan bahasa Belanda da-

⁴⁰Yen Ching Hwang, *The Overseas Chinese and 1911 Revolution* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1976), 63.

⁴¹Hwang, *The Overseas Chinese*, 112.

⁴²Ongkokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2017), 120.

⁴³Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Elsaka, 2003), 443.

⁴⁴Kelompok ini merupakan cikal bakal dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) sebuah organisasi perhaluan komunis di Hindia Belanda. Lih. Setiono, 443.

⁴⁵Suryadinata, *Politik Peranakan Tionghoa Di Jawa*, 46.

⁴⁶Lohanda, *Growing Pains*, 125.

lam setiap rapat-rapat mereka.⁴⁷ Sebetulnya baik Sin Po maupun CHH memiliki perjuangan yang sama yaitu kesetaraan di mata hukum. CHH juga merasa tidak puas dengan statusnya yang di bawah golongan Eropa, namun upaya ini tidak pernah berhasil karena pemerintah kolonial khawatir akan pergolakan dari pihak pribumi.

Kelompok ketiga dalam gerakan politik Tionghoa adalah Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang digagas oleh Liem Koen Hian pada tahun 1932. Berbeda dengan Sin Po dan CHH, kelompok ini lebih bersimpati dengan pergerakan nasional Indonesia. Bagi Liem Koen Hian, tanah air kaum Peranakan Tionghoa adalah Indonesia tempat mereka dilahirkan, dibesarkan dan dikuburkan, bukan di Tiongkok atau negeri Belanda.⁴⁸ Maka sebutan orang Indonesia sejatinya ditujukan bagi seluruh rakyat dari berbagai etnis termasuk kaum Peranakan Tionghoa.

Terjadinya malaise (krisis ekonomi global) yang melanda dunia kala itu semakin menimbulkan kesadaran akan persamaan nasib antara Peranakan Tionghoa dengan seluruh rakyat Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Suryadinata:

Tionghoa Peranakan lebih bersifat Indonesia dari pada Tionghoa. Walaupun mereka merupakan keturunan dari dua ras, mereka tinggal menetap di Indonesia, hidup dan berpikir seperti orang Indonesia, berbicara bahasa Indonesia. Mereka tidak sama dengan orang Tionghoa Totok. Disamping itu mereka sudah dan akan hidup dan mencari nafkahnya selama berpuluh generasi mendarang serta akan dikuburkan di sini juga.⁴⁹

Menurut Liem Koen Hian, golongan Totok jika menghadapi kesulitan di Indonesia akibat

krisis ekonomi bisa kembali ke negeri Tionghok. Di sana mereka bisa ditampung oleh keluarganya dan menikmati hasil tabungan dari masa kejayaan mereka. Sedangkan kaum Peranakan hanya bisa berjuang dengan masyarakat lainnya di tanah jajahan.⁵⁰

Kesadaran politik yang diusung PTI tampaknya tumbuh subur di Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun sulit berkembang di Jawa Barat karena adanya perbedaan kelas sosial. Kelompok Peranakan Tionghoa di Jawa Barat umumnya adalah pemilik perkebunan, sehingga kepentingan para pengusaha Tionghoa ini sejalan dengan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dalam mengeksploitasi hasil perkebunan di wilayah Jawa Barat. Pengaruh kuat PTI di Jawa Timur terlihat pada pemilihan Dewan Rakyat di Surabaya pada tahun 1932. PTI berhasil merebut seluruh kursi yang disediakan bagi Peranakan Tionghoa. Hal ini membuat pemuka CHH serta tokoh-tokoh Tionghoa terkejut karena PTI merupakan organisasi yang baru saja berdiri.⁵¹

Perbedaan orientasi politik ini ternyata memberikan dampak secara langsung kepada jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat yang sudah dibentuk sejak pertengahan abad ke-19. Tidak hanya itu, kadar nasionalisme Tionghok pada masing-masing jemaat menimbulkan ketegangan satu dengan yang lain.

Kondisi Jemaat-Jemaat Tionghoa di Jawa Barat Awal Abad ke-20

Hingga tahun 1926 telah berdiri jemaat-jemaat Tionghoa di beberapa kota seperti Indramayu, Batavia (Patekoan dan Mangga Besar), Cirebon, Bandung dan Sukabumi. Jemaat-jemaat tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu asuhan Nederlandsche Zendingsvereeniging (NZV) dan hasil pengabaran Injil dari Board Foreign Mission

⁴⁷Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa Di Surabaya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), 93.

⁴⁸Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, 502.

⁴⁹Suryadinata, *Politik Peranakan Tionghoa Di Jawa*, 54.

⁵⁰Leo Suryadinata, *Tokoh Tionghoa Dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hiem* (Depok: Komunitas Bambu, 2010), 66.

⁵¹Suryadinata, *Politik Peranakan Tionghoa Di Jawa*, 87.

(BFM). Kedua kelompok ini memiliki corak teologi serta bentuk pemerintahan gereja yang berbeda sesuai dengan badan misi yang melayaninya. Jemaat-jemaat Tionghoa yang berada dalam pengasuhan NZV beraliran Calvinis, sedangkan jemaat-jemaat hasil rintisan BFM bercorak Methodist.

Jemaat-Jemaat Asuhan NZV

Jemaat-jemaat Tionghoa asuhan NZV berada di Indramayu, Batavia, Cirebon, Bandung dan Sukabumi. Jemaat-jemaat tersebut sebenarnya sudah berdiri sebelum NZV menaruh perhatian kepada orang-orang Tionghoa. Sebab pada awalnya, badan misi ini hanya ingin memfokuskan karya misinya kepada kalangan Sunda. Hal itu terlihat pada dokumen NZV yang terbit pada tahun 1915, disebutkan bahwa para anggotanya sejak semula telah mengikatkan diri pada pekerjaan di tengah orang-orang Sunda serta bertanggungjawab untuk melakukan karya misi kepada kelompok suku tersebut.⁵²

Namun sejak kedatangan tiga *zendeling* NZV pertama di Jawa Barat pada tahun 1863, pengabaran Injil di kalangan Suku Sunda mendapatkan hambatan yang sangat besar.⁵³ Hendrik Kraemer menggambarkan Tanah Pasundan sebagai padang gurun rohani, seperti berikut:

Karena Tanah Pasundan ternyata merupakan sebuah padang gurun rohaniah. Para pengabar Injil menawarkan Injil kepada mereka. Mereka secara pribadi

mengalami betapa mencekam hati bila sekelompok besar penduduk dengan membisu dan tidak acuh menyatakan sikapnya: Kami tidak meminta kalian, tidak meminta pula pemberian kalian.⁵⁴

Hasil yang menggembirakan justru berasal dari kalangan Peranakan Tionghoa. Pada saat *zendeling* D. J. van der Linden datang ke Indramayu pada tahun 1863, ia menjumpai adanya komunitas Peranakan Tionghoa Kristen yang telah berdiri sejak tahun 1858.⁵⁵ Artinya komunitas ini sudah terbentuk lima tahun sebelum kehadiran NZV. Demikian juga ketika *zendeling* A. Djikstra tiba di Cirebon, di sana sudah terdapat komunitas Peranakan Tionghoa Kristen juga.⁵⁶

Komunitas-komunitas tersebut bukan hasil pengabaran Injil dari para *zendeling* Belanda, melainkan buah dari gerakan misi yang dilakukan oleh kaum awam Tionghoa. Di Indramayu, seorang pedagang keliling bernama Ang Boen Swi mendengarkan berita Injil dari seorang pendeta berkebangsaan Belanda. Di Cirebon, Yoe Ong Pao menerima Yesus Kristus setelah berjumpa dengan penginjil asal Tiongkok bernama Gan Kwee. Di Patekoan, komunitas Peranakan Kristen Tionghoa bertumbuh hasil pekerjaan Gan Kwee dan Gouw Kho. Sedangkan di Bandung, pengabaran Injil di kalangan orang Tionghoa terjadi setelah pertobatan dari seorang pedagang bernama Thung Goa Hok. Meskipun sebagian para penginjil awam tersebut pertama kali mendengarkan berita Injil dari orang-orang Belanda tetapi misi kepada sesama orang Tionghoa dilakukan oleh para penginjil Tionghoa sendiri.⁵⁷

⁵²“De Nederlandsche Zendingsvereniging (Opgericht 1858)” (NZV, 1915), 9.

⁵³Ketiga utusan pertama dari NZV yang datang ke Jawa Barat itu antara lain C. Albers (Bandung), D. J. van der Linden (Indramayu) dan A. Djikstra (Cirebon). Lih. S. Coolsma, *De Zendingseeuw Voor Nederladsch Oos-Indie* (Utrecht: C.H.E. Breijer, 1901), 86.

⁵⁴H. Kraemer, *From Mission Field to Independent Church* (The Hague: Boekencentrum, 1958), 98.

⁵⁵J. D. Wolterbeek, *Babad Zending Di Pulau Jawa* (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1995), 139.

⁵⁶Yogi Fitra Firdaus, “Peran Orang-Orang Tionghoa Dalam Pekabaran Injil: Kajian Historis Terbentuknya Jemaat Tionghoa Di Jawa Barat,” *Jurnal Abdiel* 1, no. 4 (2020): 87, <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.120>.

⁵⁷Gerakan misi kaum awam menjadi ciri khas dari komunitas Peranakan Kristen Tionghoa di Jawa Barat pada awal abad ke-19. Penginjilan yang dilakukan oleh para penginjil tersebut membentuk komunitas Peranakan Tionghoa Kristen di Indramayu (1858), Cirebon (1863), Patekoan Batavia (1863) dan Bandung (1889). Lih. Yogi Fitra Firdaus, “Lay Missionary Movement and the Establishment of the Peranakan Chinese Christian Community in West Java 1858-1889,”

Komunitas-komunitas itu pada awalnya dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri, namun selanjutnya diambil alih oleh NZV. Salah satu contohnya adalah komunitas Indramayu yang diserahkan kepada NZV oleh Pdt. J. A. W. Kroll.⁵⁸ Demikian juga dengan yang ada di kota-kota lain, komunitas-komunitas Tionghoa Kristen tersebut diambil alih juga oleh NZV dan digabungkan dengan orang-orang Sunda Kristen sehingga menghasilkan jemaat campuran Sunda dan Tionghoa.

Hingga tahun 1917 di wilayah pelayanan NZV itu tercipta dua kelompok jemaat yakni jemaat-jemaat Tionghoa saja (Indramayu, Patekoan, Karawang, Rangkasbitung dan Sukabumi) dan jemaat-jemaat campuran Sunda-Tionghoa (Bandung, Bogor, Cianjur, Cirebon, Garut, Jatinegara dan Tasikmalaya).⁵⁹ Menurut Chris Hartono, adanya jemaat campuran disebabkan oleh dua faktor: Pertama, penggabungan secara sengaja oleh NZV seperti yang terjadi di Bandung dan Cirebon. Kedua, hasil dari penginjilan kepada orang-orang Sunda dan Tionghoa yang dilakukan secara bersamaan seperti di Garut dan Tasikmalaya.⁶⁰

Jemaat-Jemaat Rintisan Board Foreign Mission (BFM)

Di awal abad ke-20, gairah penginjilan kepada penduduk di Hindia Belanda semakin meningkat. Pada masa ini misi tidak hanya dilakukan oleh para *zendeling* Belanda tetapi juga para misionaris yang berasal dari Amerika Serikat yang diutus oleh Board Foreign Mission

(BFM). BFM merupakan badan misi dari Gereja Methodist Episkopal yang berbasis di Amerika Serikat dan memiliki cabang di Semenanjung Malaya. Sejak tahun 1885, misi Methodist memang sudah hadir di Malaysia dan Singapura yang kala itu menjadi wilayah jajahan Kerajaan Inggris.⁶¹

Sebetulnya BFM telah berniat untuk mengabarkan Injil di Hindia Belanda sejak akhir abad ke-19. Sebanyak empat kali utusan BFM berkunjung ke Hindia Belanda antara lain ke Jawa (1885), Kalimantan Barat (1890), Sumatera Utara (1892) dan Sumatera Selatan (1894) untuk meninjau daerah yang akan dipilih sebagai tempat berkarya.⁶² Namun hingga menjelang akhir abad ke-19 niat itu belum terwujud karena kekurangan dana dan sumber daya manusia.

Pekerjaan BFM di Jawa Barat baru terlaksana pada awal abad ke-20 dengan kehadiran dua orang utusan misi yaitu J. R. Denyes dan B. F. West di Batavia. Di dalam laporan mereka kepada Konferensi Tahunan Gereja Methodist di Malaysia tahun 1906, J. R. Denyes menyebutkan bahwa mereka tiba di Batavia pada 14 Maret 1905. Setelah meninjau beberapa lokasi di Pulau Jawa seperti Surabaya, Yogyakarta dan Semarang mereka memutuskan untuk membuka pos misi di Batavia. Ada beberapa alasan yang membuat mereka memilih Batavia sebagai pusat kegiatan misi diantaranya:

1. Batavia sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda sehingga tidak perlu

Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan 22, no. 1 (2023): 19–37, <https://doi.org/10.36421/veritas.v22i1.591>.

⁵⁸Laporan sidang umum perwakilan *zendeling* dengan pimpinan pusat NZV yang tercantum pada warta bulanan badan misi ini. Lih. "Orgaan Der Nederlandsche Zendingvereening No.5" (NZV, November 1864), 40.

⁵⁹Tampaknya jemaat-jemaat Tionghoa mulai berkembang ke kota-kota lain di wilayah Karesidenan Batavia (Karawang), Karesidenan Bantam (Rangkasbitung), Karesidenan Buitenzorg (Bogor dan Sukabumi), Karesidenan Cheribon (Jatibarang) dan Karesidenan Priangan (Garut dan Tasikmalaya), lih. Th. van den End, *Sumber-Sumber Zending Tentang Sejarah Gereja Di Jawa Barat 1858-1963* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 46.

⁶⁰Chris Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan: Dari THKTKH West Java Hingga Menjadi GKI Jabar (1938-1958)* (Jakarta: Grafika Kreasindo, 2016), 173–74.

⁶¹Tahun 1884, Gereja Methodist Episkopal Amerika secara resmi mengutus Mr. dan Mrs. Oldham sebagai misionaris pertama di Semenanjung Malaya. Misi Methodist sangat berkembang di kalangan masyarakat Tionghoa dan India di wilayah tersebut. Lih. John Russel Denyes, *The Malaysia Mission of The Methodist Episcopal Church* (New York: Missionary Society of Methodist Episcopal Church, 1905), 15.

⁶²W. F. Oldham, *Malaysia Nature's Wonderland* (Singapore: Jennings & Graham, 1907), 64.

menempuh jarak yang jauh apabila akan mengurus permohonan izin pengabaran Injil.

2. Masyarakat Tionghoa di Batavia sudah tidak terlalu kuat memegang budaya leluhur mereka.
3. Posisinya yang berada di tengah dianggap memudahkan kontak dengan Gereja Methodist di Malaysia atau Singapura.
4. Orang-orang Tionghoa di Batavia mayoritas berbahasa Melayu. Bahasa yang sudah dikuasai oleh Denyes selama melayani di Singapura.⁶³

Atas pertimbangan tersebut maka Denyes mengajukan izin kepada pemerintah untuk melakukan penginjilan kepada masyarakat Tionghoa di Batavia.

Sembari menunggu keluarnya izin dari pemerintah, Denyes melayani kebaktian bagi jemaat berbahasa Inggris di Batavia. Di dalam suratnya kepada pimpinan distrik Singapura Denyes menyebut jemaat ini sebagai *“has been small, but there has been some spiritual advance.”*⁶⁴ Denyes merasa iba ketika menyaksikan bahwa gereja ini tidak memiliki pendeta dan mengalami kesulitan dana. Menurut Adolf Heukeun, gereja berbahasa Inggris ini merupakan peninggalan dari Walter Henry Medhurst seorang utusan London Missionary Society.⁶⁵ Pada tahun 1822 Medhurst menyelenggarakan kebaktian bagi orang-orang Inggris sekaligus membangun panti asuhan di Batavia. Selain itu, ia juga terkenal sebagai misionaris yang rajin melakukan penginjilan kepada masyarakat Tionghoa.⁶⁶

Antara Batavia dan Bogor

Jemaat Methodist pertama hasil rintisan BFM di Pulau Jawa ternyata bukan di Batavia melainkan di Kota Bogor. Di kota ini, Denyes berhasil membaptis sepasang suami istri bernama Pang Ek Poi dan Tan Si Cheng.⁶⁷ Setelah peristiwa pembaptisan tersebut, misi Methodist di Bogor mendapatkan sambutan hangat dari kalangan masyarakat Tionghoa. Rencana Denyes akhirnya berubah, pusat misi yang awalnya direncanakan akan berada di Batavia kini beralih ke Bogor.

Mulai 05 November 1905 secara resmi dibentuk jemaat Methodist pertama di Pulau Jawa. Jemaat mula-mula terdiri atas empat orang pria dan dua orang wanita Tionghoa. Setelah itu bertambah lagi empat orang pria Tionghoa sehingga berjumlah sepuluh orang.⁶⁸ Untuk sementara waktu kebaktian menggunakan tempat tinggal Denyes, tetapi selanjutnya mereka menyewa sebuah bangunan di tengah Pecinan Bogor. Di tempat yang baru ini pengujung kebaktian meningkat menjadi tiga puluh orang Tionghoa, terdiri dari dua puluh pria dan sepuluh perempuan.⁶⁹

Walaupun pusat misi beralih ke Bogor, pengabaran Injil di kalangan orang-orang Tionghoa di Batavia tetap dilakukan. Sebab kehadiran BFM di Jawa Barat memang pertama-tama adalah untuk bermisi kepada masyarakat Tionghoa seperti yang mereka kerjakan di Semenanjung Malaya dan Singapura. Oleh sebab itu pada tahun 1910, BFM mengutus dua orang misionarisnya yaitu C. S. Buchanan dan C. M. Worthington.⁷⁰ Kedua utusan misi tersebut membentuk persekutuan sekaligus pos penginjilan dengan menggunakan kedia-

⁶³“Minutes of the Fourteenth Session of The Methodist of the Malaysia Conference of The Methodist Episcopal Church, 29th January to 2nd February, 1906” (Methodist Publishing House, 1906), 30–31.

⁶⁴Elizabeth Harper Brooks, *Java and Its Challenge* (Pittsburgh: Pittsburgh Young Conference, 1911), 99.

⁶⁵Adolf Heuken, *Gereja-Gereja Tua Di Jakarta* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2008), 173.

⁶⁶William Ellis, *The History of The London Missionary Society* (London: John Snow, 1844), 546.

⁶⁷Brooks, *Java and Its Challenge*, 101.

⁶⁸Brooks, *Java and Its Challenge*, 103.

⁶⁹“Minutes of the Fourteenth Session,” 31.

⁷⁰“Minutes of the Nineteenth Session of The Methodist of the Malaysia Conference of The Methodist Episcopal Church, 11th to 18th February, 1911” (Methodist Publishing House, 1911), 52.

man dari keluarga Lee Teng Ho yang terletak di kampung muka.

Lee Teng Ho dan saudara-saudaranya (Lee Teng Po, Lee Teng San, dan Lee Kiam Tian) memiliki peran yang penting dalam pelayanan BFM di tempat itu. Maka tidak mengherankan jika persekutuan ini mendapatkan julukan sebagai Gereja Lee bersaudara.⁷¹ Gereja tersebut sering berpindah-pindah karena adanya kebutuhan tempat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan gerejawi. Setidaknya gereja ini pernah berpindah sebanyak tiga kali yakni dari Kampung Muka ke Kampung Baru hingga akhirnya me-netap di Mangga Besar.⁷²

Awalnya gereja ini hanya dikunjungi oleh 10 orang dan anggota jemaat hanya terdiri dari keluarga Lee saja. Karena masih berada di bawah naungan dari misi Methodist maka jemaat ini menggunakan nama Methodist Mission Church. Tetapi di masa selanjutnya persekutuan hasil rintisan BFM ini terus mengalami pertumbuhan secara kuantitas, sehingga pada tahun 1926 jemaat ini ditingkatkan statusnya menjadi Gereja Methodist Jemaat Mangga Besar.⁷³

Pelayanan BFM di Pulau Jawa tidak berlangsung lama, setelah 13 tahun bekerja di antara orang-orang Tionghoa di Bogor dan Batavia mereka memutuskan untuk memindahkan seluruh pelayanannya ke Sumatera karena keterbatasan dana. Hal itu berdampak juga pada jemaat-jemaat yang telah dibangun oleh badan misi ini. Jemaat Methodist Mangga Besar meresponinya dengan membentuk gereja mandiri yang bernama Tionghoa Kie Tok

⁷¹Chris Hartono, *Orang Tionghoa dan Pekabaran Injil: Suatu Studi Tentang Pekabaran Injil Kepada Masyarakat Tionghoa Di Jawa Barat Pada Masa Kolonial Hindia Belanda* (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1996), 38.

⁷²Paulus Kurnia dan Leonard Halle, *Gereja Kristus Ketapang Asal Usul Dan Derap Langkahnya Menuju Milenium Ke-3*. (Cipanas: STT Cipanas, 1999), 8.

⁷³Pendeta A. V. Klaus ditunjuk sebagai ketua majelis dari jemaat ini, lih. Kurnia dan Leonard Halle, 28.

⁷⁴THKTKH Mangga Besar resmi berdiri pada 1 Januari 1928, kepengurusan gereja sepenuhnya berasal dari orang-orang

Kauw Hwee (THKTKH) Jemaat Mangga Besar.⁷⁴ Untuk sementara waktu jemaat ini dilayani oleh para *zendeling* NZV sampai pada akhirnya benar-benar melepaskan diri dari ikatan dengan badan misi Eropa.

Selain di Mangga Besar, jemaat bekas asuhan BFM juga terdapat di daerah Tanah Abang. Persekutuan di Tanah Abang mulai dirintis pada 1 Juni 1906 oleh seorang pengabar Injil Sunda bernama Balok Arpasad. Awalnya pos misi di Tanah Abang difokuskan untuk menjangkau orang-orang Sunda, namun ternyata Injil lebih menarik perhatian orang-orang Tionghoa yang berbahasa Hokkian.⁷⁵ Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi orang-orang Tionghoa tersebut, maka diutus sepasang suami istri misionaris asal Singapura bernama Khu Chiang Bie dan Ah Souw.⁷⁶

Jemaat Tanah Abang semakin berkembang dan menciptakan dua kelompok jemaat dengan bahasa pengantar yang berbeda. Jemaat berbahasa Melayu tetap dilayani oleh Balok Arpasad. Sedangkan pada tahun 1909, jemaat berbahasa Hokkian mulai dilayani oleh Diong Eng Seng yang sebelumnya bertugas di Sarawak.⁷⁷

Dampak Pergerakan Politik Tionghoa pada Jemaat-Jemaat Tionghoa di Jawa Barat

Hartono menyebutkan bahwa menjelang tahun 1926, jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat berada dalam kondisi yang terpecah. Situasi ini tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan warna teologi di antara jemaat-jemaat asuhan NZV dengan BFM, melainkan

ang Tionghoa. Lih. Hartono, *Orang Tionghoa Dan Pekabaran Injil: Suatu Studi Tentang Pekabaran Injil Kepada Masyarakat Tionghoa Di Jawa Barat Pada Masa Kolonial Hindia Belanda*, 38.

⁷⁵Brooks, *Java and Its Challenge*, 154.

⁷⁶Brooks, *Java and Its Challenge*, 155.

⁷⁷"Minutes of the Seventeenth Session of The Methodist of the Malaysia Conference of The Methodist Episcopal Church, 5th to 9th February, 1909" (Methodist Publishing House, 1909), 24.

juga karena adanya faksi-faksi politik di kalangan Tionghoa secara umum. Demikian juga dengan kebangkitan nasionalisme Tiongkok berpengaruh secara langsung pada jemaat-jemaat Tionghoa tersebut.⁷⁸

Pengaruh Neo-Konfusianisme pada jemaat-jemaat Tionghoa

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa gerakan politik Tionghoa di Jawa Barat diawali dengan pendirian THHK. Organisasi ini tidak hanya berjuang untuk peningkatan pendidikan serta kebudayaan masyarakat Tionghoa, tetapi juga didorong oleh aspek religius dengan mengembangkan kembali ajaran Khong Hu Cu seperti yang tertera pada anggaran dasar THHK.

Penulis bisa memahaminya karena ajaran Khong Hu Cu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tionghoa selama ribuan tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Hariyono dalam bukunya:

Selama masa dinasti Han (205 SM-220 M) ajaran Konfusius praktis telah menjadi ajaran agama negara. Dalam tahun 130 SM ajaran itu dinyatakan sebagai ilmu dasar dalam pendidikan pejabat-pejabat pemerintah, dan merupakan suatu pola yang pada dasarnya masih berlanjut sampai berdirinya Republik Tiongkok pada tahun 1912.⁷⁹

THHK yang awal mulanya berdiri di Batavia terus berkembang ke berbagai kota di Pulau Jawa termasuk Bandung dan Bogor. Ideologi Konfusianisme yang diusung oleh organisasi ini ternyata telah memperkuat identitas orang-orang Tionghoa di Jawa Barat tak terkecuali mereka yang sudah beragama Kristen.

Isu ini telah mendapatkan perhatian khusus dari NZV sebagai pengasuh jemaat-jemaat Tionghoa hasil rintisan para pengabar Injil awam Tionghoa. Misalkan pada rapat jemaat di Bandung yang dilaksanakan 20 November 1905, THHK dan Konfusianisme ini menjadi bahasan khusus. *Zending* H. C. G. Ruttink yang bertugas di Bandung, di dalam laporannya menyatakan adanya anggota jemaat Tionghoa di Bandung yang menolak untuk menutup bengkelnya pada hari Minggu tetapi bersedia berhenti bekerja pada saat perayaan hari kelahiran Khong Hu Cu.⁸⁰ Hal itu menimbulkan perdebatan di kalangan *zending* apakah anggota jemaat Tionghoa boleh hadir dalam perayaan kelahiran Khong Hu Cu dan menjadi anggota dari organisasi THHK. Disebabkan oleh besarnya animo anggota jemaat Tionghoa di Bandung untuk terlibat dalam THHK, maka diambil keputusan untuk melarang keikutsertaan orang-orang Tionghoa Kristen dalam berbagai kegiatan THHK.⁸¹

Kejadian yang serupa juga terjadi di Bogor. *Zending* B. M. Alkema pada tahun 1906 menyampaikan laporannya mengenai tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tionghoa di kota itu. Menurutnya Konfusianisme telah menjadi daya tarik bagi para pemuda Tionghoa. Hal itu menjadi hambatan terbesar bagi pengabaran Injil bagi orang-orang Tionghoa di sana. Selain itu di kalangan pemuda Tionghoa yang sudah menjadi Kristen, mereka lebih memilih untuk terlibat dalam gerakan politik Tionghoa ketimbang terlibat dalam persekutuan gerejawi. Maka ketika ditanyakan kepada para pemuda itu, “Apakah mereka mau memilih Kristus atau gerakan politik Tionghoa?” jawaban mereka adalah gerakan politik.⁸²

⁷⁸Faksi-faksi yang dimaksud adalah Sin Po, Chung Hua Hui (CHH) dan Partai Tionghoa Indonesia. Lih. Hartono, *Dari Cipaku Sampai Jakarta*, 21.

⁷⁹P. Hariyono, *Kultur Cina Dan Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), 17.

⁸⁰*Gemeentelijke vergadering te Bandoeng, 20 November 1905*, lih. van den End, *Sumber-Sumber Zending*, 346.

⁸¹J. H. Blinde, “De Tiong Hoa Hwee Koan Te Bandoeng,” *Orgaan Der Nederlandsche Zendingvereeniging*, Januari 1906, XLVI No. 1, 3–7.

⁸²B. M. Alkema, “Uit Den Nieuwen Werkkring,” *Orgaan Der Nederlandsche Zendingvereeniging*, Januari 1906, XLVI No.1, 104–5.

Kesadaran akan Kesatuan dan Kemandirian Jemaat-Jemaat Tionghoa

Dampak langsung dari gerakan politik Tionghoa yang paling besar adalah kesadaran akan perlunya kesatuan dan kemandirian. Sebagian tokoh Tionghoa Kristen mulai peka terhadap situasi perpecahan di tengah jemaat akibat timbulnya faksi-faksi politik serta orientasi politiknya masing-masing. Maka pada tahun 1926, Pouw Peng Hong salah seorang tokoh dari jemaat Mangga Besar memulai gagasan untuk menyatukan jemaat-jemaat Tionghoa.⁸³ Gagasannya seperti tercantum pada kutipan dari majalah bulanan *Maandblad Kristen Tionghoa* tanggal 15 Agustus 1928 di bawah ini:

“Pegimana nanti djadi Djoemaat-djoemaat Tionghoa Kristen di tanah kepoelaoan ini, djikaloe sekali peristiwa itoe zending-zending Europa dan Amerika membrentiken pekerdjaanja terhadap pada kaoem kita, oleh karna merasa perloe dikabarkannja Indjil dalam kalangan Boemipoetra, jang sakean lamanya blom dikerdjahkan oleh pihak zending dengan sesoenggoehnya,” dan “Berapa orang Tionghoa di Djawa ini? Kenapa tida ada pergerakan apa-apa?”⁸⁴

Di dalam pandangan penulis ada dua hal yang menjadi dasar dari pernyataan Pouw Peng Hong: (1) kenyataan bahwa fokus badan-badan *zending* dari semula adalah untuk mengabarkan injil kepada kalangan pribumi (2) perginya badan misi Methodist dari Jawa Barat karena alasan dana. Apalagi menurut Th. van den End, Pouw Peng Hong adalah tokoh dari jemaat bekas asuhan Methodist yang memiliki pengalaman ditinggalkan oleh badan misi Barat.⁸⁵ Oleh sebab itu Pouw Peng Hong mengajak seluruh jemaat-jemaat Tionghoa yang

ada di Jawa Barat untuk menyatukan diri sebagai langkah awal menuju kemandirian. Upaya tersebut diawali dengan pendirian Bond Kristen Tionghoa (BKT) dan berakhir pada pembentukan Gereja Tionghoa Serikat (GTS).

Pembentukan Bond Kristen Tionghoa (BKT) sebagai Usaha Awal

Sebagai langkah awal untuk merealisasikan usaha kesatuan dan kemandirian jemaat-jemaat Tionghoa, pada tanggal 25-27 November 1926 diselenggarakan konferensi Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee (THKTKH). Pouw Peng Hong sendiri bertindak sebagai wakil ketua panitia dari konferensi tersebut.⁸⁶ Di dalam konferensi ini dibahas tiga isu utama yaitu perlunya jemaat-jemaat Tionghoa di Hindia Belanda untuk mempersatukan diri, pentingnya peran para kepala keluarga sebagai teladan Injil dan dorongan kepada setiap majelis jemaat untuk menuju kemandirian gereja.⁸⁷

Pada konferensi ke-2 yang diselenggarakan tanggal 22-24 Juni 1927 di Cirebon, diresmikan pendirian dari Bond Kristen Tionghoa (BKT).⁸⁸ Di dalam konferensi ini juga disahkan anggaran dasar BKT yang disusun oleh empat orang perwakilan yang berasal dari tokoh-tokoh jemaat Tionghoa serta utusan *zending* NZV yaitu Lee Teng San, F. W. H. Hope, Tan Thian Tjong, dan Oen Tek Chew. Semangat kemandirian terlihat pada anggaran dasar pasal 3.c yang berbunyi: *“Boeat mempanasken dan menambahkan kepertjajaan soepaia orang Kristen Tjonghoa mengenal koewadjiban boeat mengoeroes dan mengongkosi geredjanja sendiri.”⁸⁹* Tampaknya pengurus BKT telah memahami bahwa kesediaan

⁸³Hartono, *Dari Cipaku Sampai Jakarta*, 23.

⁸⁴Pouw Peng Hong, “Riwayat Conferentie Kristen Tionghoa Jang Pertama Kali,” *Maandblad Kristen Tionghoa (THKTKH) Tahun 1 No. 8*, 15 Agustus 1928, 1.

⁸⁵Van den End, *Sumber-Sumber Zending*, 47.

⁸⁶Hartono, *Dari Cipaku Sampai Jakarta*, 26.

⁸⁷Hong, “Riwayat Conferentie Kristen,” 4-5.

⁸⁸Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan*, 196.

⁸⁹Anggaran dasar Bond Kristen Tionghoa dalam *Verslag Conferentie Kristen Tionghoa jang dibikin di Hotel Canton Cheribon dari tanggal 22-24 Juni 1927*. Pertemuan ini juga dilaporkan dalam majalah *De Opwekker* edisi 72 tahun 1927. Lih. End, *Sumber-Sumber Zending*, 547.

menanggung biaya operasional jemaat merupakan syarat mutlak dari kemandirian gereja.

Isu perbedaan denominasi dari badan-badan misi yang mengasuh atau merintis jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat mencuat dalam konferensi di Cirebon ini. Hal itu terlihat pada anggaran dasar BKT pasal 5 yang tertulis, “*Bond Mengakoei kebbaikannja semoea geredja Kristen tetapi mengandjoer djangan memberatkan perkara medzhab (denominationalisme) dan menoedjoe pada persatoean geredja-geredja Kristen Tionghoa.*”⁹⁰ Di dalam pengamatan penulis, pemikiran itu tercipta atas perbedaan denominasi dari jemaat-jemaat Tionghoa yang dipengaruhi oleh badan misi masing-masing, di mana jemaat-jemaat Tionghoa ini ada yang beraliran Calvinis dan ada juga yang bercorak Methodist.

BKT khawatir jika perbedaan denominasi yang dibawah oleh badan misi Eropa dan Amerika itu, akan menghambat usaha penyatuan dari jemaat-jemaat Tionghoa tersebut. Penulis juga bisa melihat kekhawatiran tersebut dari surat BKT kepada NZV yang dikutip oleh Hartono seperti demikian:

*Kita bermohon kepada Zendings Corporaties (ZC) dari berbagi-bagi medzhab jang bekerdja di antara bangsa Tionghoa boewat djangan mengadjar denominasionalisme tetapi mengabarkan Indjil Jezoes Christoes jang dikirim Allah Bapa kedoenna ini boewat meneboes manoesia dari dosanja.*⁹¹

Surat tersebut dikirim pada 1 Mei 1927 artinya satu bulan sebelum penyelenggaraan konferensi BKT ke-2. Kemungkinan besar surat itu ditulis bersamaan dengan proses penyusunan anggaran dasar dari BKT.

Meningkatnya Kadar Nasionalisme Tionggok pada Konferensi ke-3 BKT

Konferensi ke-3 BKT diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus-2 September 1928. Konferensi kali ini dihadiri juga oleh utusan dari Tionggok yakni Pdt. T. C. Cheu. Menurut Hartono, kehadiran utusan dari negeri Tionggok tersebut berkaitan dengan keberhasilan gereja-gereja di sana menyatukan diri dalam The Church of Christ in China (CCC) yang berdiri sejak tahun 1927.⁹²

Keberhasilan dari gereja-gereja di Tionggok itu menumbuhkan optimisme di kalangan BKT, jika mereka dapat menyatukan jemaat-jemaat Tionghoa yang ada di seluruh Hindia Belanda dalam sebuah organisasi gerejawi yang besar. Namun, hingga penyelenggaraan konferensi ketiga ini belum juga ada kemajuan yang berarti.⁹³

Lee Teng San menganggap lambatnya gerakan dari BKT disebabkan oleh hambatan dari *zending* seperti yang dia sampaikan dalam pidatonya:

*Kaloe orang tanja: apa Bond lakoe djoega di medannja Zendingcorporaties? Ast... Saja minta ampoen kaloe boengkem sebab semendjak ini blom saja bisa mendjawab. Sebab? Sebab kaloe lakoe dimedannja Zendingcorporaties jang beradah di kepoe-laoan ini nistjajalah zending dengan ridlah: mensahken Bond Kresten Tionghoa soepaja djadi poesatnya segala oeroesan jang menjangkoet dengan djomaat Tionghoa jang soedang besar dengan perwatesken 5-6 taon, sampe marika bisa melakoeken zelf-bestuur, zelsonderhoud en zelfuitbreiding...*⁹⁴

Pidato di atas menimbulkan sentimen terhadap *zending* di sebagian jemaat-jemaat Tionghoa yang hadir pada konferensi ke-3 itu. Aki-

⁹⁰Van den End, *Sumber-Sumber Zending*, 548.

⁹¹Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan*, 198.

⁹²Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan*, 197.

⁹³Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan*, 199.

⁹⁴Lee Teng San, “Begimana Soepaya Bond Kristen Tionghoa Bisa Pakerdjaanja (Organisatienja),” *Maandblad Kristen Tionghoa (THKTKH) Tahun 1 No. 8*, 15 Agustus 1928, 25–26.

batnya tokoh-tokoh BKT mengupayakan agar jemaat-jemaat Tionghoa yang ada di Jawa Barat bahkan seluruh Hindia Belanda untuk menggabungkan diri dengan CCC di Tiongkok.⁹⁵ Di dalam pengamatan penulis, hal itu tidak dapat dilepaskan dari meningkatkan kadar nasionalisme Tiongkok pada kalangan Tionghoa Kristen yang sudah menghangat sejak awal abad ke-20.

Jika merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai nasionalisme Tiongkok, sepertinya gagasan dari Sin Po yang menyatakan bahwa Tiongkok adalah pelindung orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda, diterima juga oleh tokoh-tokoh BKT dalam konteks kekristenan. Terlebih pendirian CCC juga dilandasi oleh semangat nasionalisme Tiongkok dan gerakan anti badan misi Barat yang melanda Tiongkok sejak tahun 1927.⁹⁶

Konferensi ke-3 itu ternyata menjadi konferensi terakhir dari BKT. Organisasi ini gagal dalam menyatukan jemaat-jemaat Tionghoa yang ada, bahkan seolah-olah mati suri hingga pendirian Gereja Tionghoa Serikat pada tahun 1934.

Upaya Mendirikan Organisasi Baru

Setelah BKT gagal dalam menyatukan serta membawa jemaat-jemaat Tionghoa pada kesatuan dan kemandirian, tokoh-tokoh dari organisasi ini kembali berkumpul untuk menyelenggarakan pertemuan di Cirebon, tanggal 13-15 Juni 1934.⁹⁷ Pada pertemuan ini digagas pendirian organisasi baru yang serupa dengan BKT dan masih memiliki tujuan yang sama. Kali ini cita-cita mereka bukan sekadar mempersatukan jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat, melainkan juga di seluruh Hindia Belanda. Surat kabar *Keng Po*, mencatat bahwa

pertemuan ini dihadiri oleh utusan-utusan jemaat Tionghoa yang berasal dari Batavia, Indramayu, Bandung, Cirebon, Semarang, Salatiga, Magelang, Purworejo dan Solo.⁹⁸

Menilik tujuan pendirian organisasi pengganti BKT tersebut, penulis mendapatkan fakta bahwa di masa ini jemaat-jemaat Tionghoa tidak hanya berjuang untuk menyatukan jemaat-jemaat Tionghoa yang masih terpisah-pisah itu. Tetapi juga mulai berpikir untuk terlibat dalam isu-isu sosial yang marak terjadi di kalangan masyarakat Tionghoa kala itu seperti judi, alkohol dan opium. Maka salah satu butir dari manifesto yang dihasilkan pada konferensi di Cirebon ini adalah “*memadjoeken kabadjiken oemoem.*”⁹⁹

Gereja Tionghoa Serikat (GTS) sebagai Penerus BKT

Walaupun konferensi pertama dilakukan di Cirebon tahun 1934, organisasi baru yang diberi nama Gereja Tionghoa Serikat (GTS)/ Chung Hua Chi Tuh Chiao Hui (CHCTCH) itu, baru secara resmi berdiri pada konferensi kedua yang dilaksanakan di Bandung tanggal 31 Mei-1 Juni 1936.¹⁰⁰ Pertemuan ini dihadiri oleh para utusan dari jemaat-jemaat Tionghoa di Pulau Jawa yang tergabung dalam *Khoe Hwee* (klasis) seperti Khoe Hwee Djawa Timoer, Khoe Hwee Djawa Tengah Selatan dan Khoe Hwee Djawa Tengah Oetara.¹⁰¹

Pertemuan yang berlangsung selama satu minggu itu ternyata tidak berhasil menyatukan semua jemaat Tionghoa di dalam organisasi baru tersebut. Berdasarkan catatan dalam buku peringatan 50 tahun GKI Jabar Kebonjati 100 Bandung, disebutkan bahwa Jemaat Patekoan dan Jemaat Senen menolak untuk menjadi anggota GTS. Kedua jemaat

⁹⁵Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan*, 200.

⁹⁶Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan*, 194.

⁹⁷ Konferensi ini diselenggarakan di Cirebon sebagai langkah awal dari pembentukan CHCTCH atau GTS. Lih. van den End, *Sumber-Sumber Zending*, 48.

⁹⁸“Verslag Conferentie Kristen Tionghoa Di Cheribon, Juli 1934,” *Keng Po*, 17 Juli 1934.

⁹⁹“Verslag Conferentie Kristen Tionghoa.”

¹⁰⁰Penulis menggunakan istilah Gereja Tionghoa Serikat (GTS) untuk membedakannya dengan Sinode CHCTCH yang berdiri pada tahun 1939. Lih. Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan*, 203.

¹⁰¹Hartono, *Dari Cipaku Sampai Jakarta*, 35.

ini berpendapat agar jemaat-jemaat di Jawa Barat sebaiknya membentuk satu *Khoe Hwee* terlebih dahulu sehingga yang menjadi anggota GTS bukanlah jemaat-jemaat lokal melainkan *Khoe Hwee*-nya.¹⁰² Meskipun demikian, organisasi ini tetap didirikan dengan pengurus yang berasal dari perwakilan jemaat-jemaat Tionghoa antara lain: Liem Siok Hie, Tan Goan Tjong, Oen Tek Chew dan Liem Boen Liong.¹⁰³

Ketegangan antara utusan Jemaat Patekoan, Jemaat Senen dengan Jemaat Mangga Besar berlangsung hingga setelah konferensi Bandung ditutup. Berdasarkan surat dari *zending* A. K. de Groot kepada pengurus pusat NZV yang dikirim 8 Juni 1936 disebutkan bahwa keberatan dari Jemaat Patekoan terhadap GTS berkaitan dengan dua isu yang dibahas yaitu anggaran dasar serta sikap anti terhadap *zending*. Selain itu de Groot menangkap adanya perbedaan orientasi politik di antara jemaat-jemaat tersebut yang disebabkan oleh timbulnya nasionalisme Tiongkok terutama di kelompok bekas asuhan Methodist.¹⁰⁴

Pengaruh nasionalisme Tiongkok itu terlihat pada:

1. Orientasi GTS kepada CCC di Tiongkok.
2. GTS ingin membentuk gereja etnis oleh sebab itu gereja bekas asuhan Methodist ingin membentuk sebuah gereja dengan suasana kebangsaan yang dijiwai oleh semangat kebudayaan Tionghoa. Kelompok ini lebih suka jika GTS menunjukkan sikap anti *zending* sebagai konsekuensi dari penekanan etnisitasnya.¹⁰⁵

Perbedaan kadar pengaruh nasionalisme Tiongkok, sikap terhadap *zending* Belanda dan pemahaman mengenai gereja etnis dari Jemaat-Jemaat bekas Methodist dan NZV membuat GTS menemui kegagalan kembali, bahkan menimbulkan perpecahan yang semakin besar di kemudian hari.

Besatu dan berpisah

Di tengah situasi yang penuh ketegangan, GTS mengadakan konferensi di Purworejo pada 27-29 Maret 1937. Di dalam konferensi ini dibahas mengenai pengesahan ulang peraturan GTS, penerimaan anggota-anggota baru, upaya untuk memperluas GTS hingga ke luar Jawa dan yang paling penting adalah rencana pembentukan *Khoe Hwee Djawa Barat* sesuai usulan pada konferensi di Bandung.¹⁰⁶

Hasil dari tindak lanjut konferensi di Purworejo itu, maka dibentuk Tiong Hoa Kie Tok Kaw Hwee Khoe Hwee Djawa Barat (THKTKH-KHDB) pada tanggal 12 November 1938 di Jakarta. THKTKH-KHDB ini terdiri atas Jemaat-Jemaat Tionghoa asuhan NZV (Patekoan, Senen, Bandung, Indramayu dan Cirebon) dan bekas asuhan Methodist (Mangga Besar, Tanah Abang dan Bogor). Hal ini sesuai dengan keputusan GTS yang mengharuskan anggotanya membentuk sebuah klasis terlebih dahulu baru bergabung dengan wadah kesatuan tersebut.¹⁰⁷

Namun, baru satu tahun berdiri THKTKH-KHDB ini harus mengalami peristiwa pahit yaitu perpecahan dengan keluarnya Jemaat-Jemaat bekas asuhan Methodist. Kembali persoalannya bukan sekadar perbedaan warna teologi dan sistem pemerintahan gerejawi tetapi juga pengaruh nasionalisme Tiongkok yang menimbulkan sikap anti *zending* dalam Jemaat-Jemaat tersebut. Hal tersebut telah

¹⁰²MJ GKI Jabar Kebonjati 100 Bandung, *50 Tahun GKI Jabar Kebonjati 100 Bandung, 1924-1974* (Bandung: GKI Jabar Kebonjati 100, 1974), 10.

¹⁰³Hartono, *Dari Cipaku Sampai Jakarta*, 37.

¹⁰⁴Pandangan A. K. de Groot mengenai masalah-masalah yang telah muncul dalam lingkungan orang Kristen Tionghoa. Lih. van den End, *Sumber-Sumber Zending*, 643.

¹⁰⁵Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan*, 209–11.

¹⁰⁶Hartono, *Dari Cipaku Sampai Jakarta*, 39.

¹⁰⁷Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan*, 211.

menciptakan ketegangan antara Jemaat-Jemaat asuhan NZV terutama Patekoan dan Senen dengan bekas asuhan Methodist. Konflik ini merupakan buntut panjang sejak pendirian GTS tahun 1934. Jemaat-Jemaat bekas asuhan Methodist terutama yang digawangi oleh Oen Teck Chew masih ingin mengidentifikasi diri dengan The Church of Christ in China (CCC) sebagai bentuk dari orientasi mereka kepada daratan Tiongkok.¹⁰⁸ Selain itu masalah perbedaan pemahaman akan gereja etnis dan anti *zending* tetap terbawa hingga THKTKH-KHDB.

Ketegangan-ketegangan itu berujung dengan keluarnya Jemaat Mangga Besar dari THKTKH-KHDB pada 24 April 1939 diikuti dengan Jemaat Tanah Abang dan Bogor. Melalui surat keputusan Gubernur Jendral tanggal 12 Juni 1939 yang tercatat dalam statblaad no. 298, THKTKH Mangga Besar memiliki badan hukum sendiri sebagai gereja dan mengubah namanya menjadi Sinode Chung Hua Chi Tu Chiao Hui dengan anggota gereja pertama adalah CHCTCH Mangga Besar, CHCTCH Tanah Abang dan CHCTCH Bogor.¹⁰⁹

Meskipun sudah berpisah, konflik antara THKTKH KHDB dengan Sinode CHCTCH tidak segera berakhir. Sikap anti *zending* masih terbawa hingga menjelang tahun 1940. Kala itu beredar kabar bahwa THKTKH-KHDB akan membuka gereja bagi orang-orang Tionghoa di Bogor, padahal Sinode CHCTCH sudah membuka pelayanan terlebih dahulu di kota tersebut. Bagi CHCTCH hal ini akibat dari THKTKH-KHDB sudah sangat dipengaruhi bahkan menjadi alat dari *zending*. Pernyataan ini dimuat di koran *Kengpo* dan *Siangpo* terbitan 20 dan 25 Mei 1939.¹¹⁰

Selepas perpecahan pada tahun 1939 yang menimbulkan dua gereja Tionghoa di Jawa Barat yaitu THKTKH-KHDB dan Sinode CHCTCH. THKTKH-KHDB terus membangun pelayanannya. Berdasarkan pengakuan

dari Gubernur Jendral Hindia Belanda melalui statblaad No. 01 dan No. 100, THKTKH KHDB menjadi badan hukum gereja yang resmi sejak 24 Maret 1940.¹¹¹ Maka sejak itu lahir dua sinode gereja berlatar belakang Tionghoa di Jawa Barat yang pembentukannya dipengaruhi oleh gerakan politik Tionghoa.

KESIMPULAN

Kesadaran akan kemandirian dan kesatuan dari jemaat-jemaat Tionghoa di Jawa Barat, merupakan dampak langsung dari gerakan politik Tionghoa di Jawa Barat pada abad ke-20. Orang-orang Tionghoa Kristen pada saat itu menghadapi dua isu yaitu status warga negara di dalam Pemerintah Hindia Belanda serta hubungan mereka dengan *zending* Belanda yang sewaktu-waktu dapat meninggalkan jemaat-jemaat yang diasuhnya. Selain itu jemaat-jemaat Tionghoa juga masih dalam kondisi terpisah karena perbedaan denominasi dari badan misi yang menaunginya yaitu jemaat-jemaat yang bercorak teologi Calvinis dan Methodist.

Upaya penyatuan jemaat-jemaat Tionghoa tersebut diwujudkan dengan pembentukan organisasi Bond Kristen Tionghoa (BKT) dan Gereja Tionghoa Serikat (GTS). Kedua organisasi tersebut sebetulnya memiliki cita-cita yang sama yaitu membentuk satu sinode gereja Tionghoa dan juga melanjutkan karya misi kepada orang-orang Tionghoa yang telah dirintis sejak pertengahan abad ke-19.

Tetapi upaya tersebut tidak berjalan dengan mulus karena perbedaan orientasi politik serta kadar nasionalisme Tiongkok. Jemaat-jemaat Methodist ingin cenderung berorientasi kepada Tiongkok sehingga ingin menggabungkan GTS dengan CCC di Tiongkok. Sehingga jemaat-jemaat Methodist lebih terkesan anti terhadap *zending* Belanda. Sedangkan jemaat-jemaat Calvinis lebih berorientasi

¹⁰⁸“Verslag Conferentie Kristen Tionghoa.”

¹⁰⁹Kurnia dan Halle, *Gereja Kristus Ketapang*, 46.

¹¹⁰Hartono, *Sejak Emas Murni Ditemukan*, 231.

¹¹¹Van den End, *Sumber-Sumber Zending*, 702.

kepada Hindia Belanda dan ingin tetap menjaga hubungan baik dengan *zending* Belanda.

Persoalan lain yang muncul di antara kedua jemaat tersebut adalah konsep gereja etnis dengan gereja bahasa. Ketegangan memuncak pada tahun 1939 dengan berpisahnya 3 jemaat Methodist dari tubuh THKTKH-KHDB serta mendirikan Sinode CHCTCH. Perpisahan ini tidak hanya didorong oleh perbedaan denominasi tetapi yang lebih utama adalah pengaruh nasionalisme Tiongkok sebagai dampak dari gerakan politik Tionghoa kala itu. Walaupun demikian, situasi itu telah melahirkan dua sinode gereja Tionghoa di Jawa Barat yang terus berkembang hingga saat ini.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis menyatakan telah memberikan kontribusi substansial untuk perancangan dan penulisan hasil penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis, interpretasi dan diskusi hasil penelitian. Penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan apa pun yang dapat memengaruhinya dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Alkema, B. M. "Uit Den Nieuwen Werkkring." *Orgaan Der Nederlandsche Zendingsvereeniging*, January 1906, XLVI No.1 edition.
- Blinde, J. H. "De Tiong Hoa Hwee Koan Te Bandoeng." *Orgaan Der Nederlandsche Zendingsvereeniging*, January 1906, XVLII No. 1 edition.
- Brooks, Elizabeth Harper. *Java and Its Challenge*. Pittsburgh: Pittsburgh Young Conference, 1911.
- Carey, Peter. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*. Depok: Komunitas Bambu, 2015.
- Coolsma, S. *De Zendingseeuw Voor Nederlandsch Oos-Indie*. Utrecht: C.H.E. Breijer, 1901.
- Daulay, Richard M. *Mengenal Gereja Methodist Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- "De Nederlandsche Zendingsvereeniging (Opgericht 1858)." NZV, 1915.
- Denyes, John Russel. *The Malaysia Mission of The Methodist Episcopal Church*. New York: Missionary Society of Methodist Episcopal Church, 1905.
- Dharmowijono, Widjajanti W. *Bukan Takdir: Kisah Pencitraan Orang Tionghoa Di Nusantara*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2021.
- Ellis, William. *The History of The London Missionary Society*. London: John Snow, 1844.
- End, Th. van den. *Sumber-Sumber Zending Tentang Sejarah Gereja Di Jawa Barat 1858-1963*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Endriana, Cindy. "Sekolah Tiong Hwa Hwee Kwan (THHK) Di Mojokerto Pada Tahun 1907-1942." *Avatara* 3, no. 3 (2015).
- Firdaus, Yogi Fitra. "Lay Missionary Movement and the Establishment of the Peranakan Chinese Christian Community in West Java 1858-1889." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 22, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36421/veritas.v22i1.591>.
- Firdaus, Yogi Fitra. "Peran Orang-Orang Tionghoa Dalam Pekabaran Injil: Kajian Historis Terbentuknya Jemaat Tionghoa Di Jawa Barat." *Jurnal Abdiel* 1, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.120>.
- Hariyono, P. *Kultur Cina dan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Hartono, Chris. *Dari Cipaku Sampai Jakarta: Sejarah Singkat Upaya-Upaya Keesaan dari Pembentukan Bond Kristen Tionghoa Sampai Pembentukan Sinode Am*

- Gereja Kristen Indonesia*. Jakarta: Grafika Kreasindo, 2017.
- Hartono, Chris. *Orang Tionghoa dan Pekabaran Injil: Suatu Studi Tentang Pekabaran Injil Kepada Masyarakat Tionghoa Di Jawa Barat Pada Masa Kolonial Hindia Belanda*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1996.
- Hartono, Chris. *Sejak Emas Murni Ditemukan: dari THKTKH West Java Hingga Menjadi GKI Jabar (1938-1958)*. Jakarta: Grafika Kreasindo, 2016.
- Heuken, Adolf. *Gereja-Gereja Tua Di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2008.
- Hong, Pouw Peng. "Riwayat Conferentie Kristen Tionghoa Jang Pertama Kali." *Maandblad Kristen Tionghoa (THKTKH) Tahun 1 No. 8*, Agustus 1928.
- Hwang, Yen Ching. *The Overseas Chinese and 1911 Revolution*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1976.
- Kraemer, H. *From Mission Field to Independent Church*. The Hague: Boekencentrum, 1958.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. 2nd ed. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 2005.
- Kurnia, Paulus and Leonard Halle. *Gereja Kristus Ketapang Asal Usul Dan Derap Langkahnya Menuju Milenium Ke-3*. Cipanas: STT Cipanas, 1999.
- Kwartanada, Didi. "Mandarin Comes to the South Seas: The Making of Chinese Education in Early Twentieth Century Java." *Asian Culture* 42 (2018).
- Kwartanada, Didi. "The Tiong Hoa Hwee Koan School: A Trans Border Project of Modernity in Batavia, c. 1900s." Dalam *Chinese Indonesians Reassessed History, Religion and Belonging*. Abingdon: Routledge, 2013.
- Lan, Nio Joe. *Riwayat 40 Taon Dari Tiong Hoa Hwe Koan-Batavia (1900-1939)*. Batavia: THHK, 1940.
- Liji, Liang. *Dari Relasi Upeti Ke Mitra Strategis: 2000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.
- Lohanda, Mona. *Growing Pains: The Chinese and The Dutch in Colonial Java, 1890-1942*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2002.
- Lohanda, Mona. *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Lubis, Nina H. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2018.
- "Minutes of the Fourteenth Session of The Methodist of the Malaysia Conference of The Methodist Episcopal Church, 29th January to 2nd February, 1906." Methodist Publishing House, 1906.
- "Minutes of the Nineteenth Session of The Methodist of the Malaysia Conference of The Methodist Episcopal Church, 11th to 18th February, 1911." Methodist Publishing House, 1911.
- "Minutes of the Seventeenth Session of The Methodist of the Malaysia Conference of The Methodist Episcopal Church, 5th to 9th February, 1909." Methodist Publishing House, 1909.
- MJ GKI Jabar Kebonjati 100 Bandung. *50 Tahun GKI Jabar Kebonjati 100 Bandung, 1924-1974*. Bandung: GKI Jabar Kebonjati 100, 1974.
- Nabila, Ayu Putri. "Sekolah Tiong Hoa Hwee Kwan (STHHK) Sebagai Representasi Pendidikan Modern Etnis Tionghoa Di Batavia Tahun 1901-1942." *Mozaik Jurnal Kajian Sejarah* 12, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.21831/moz.v12i2.45621>.
- Niemeijer, Hendrik E. *Batavia Masyarakat Kolonial Abad XVII*. Depok: Masup Jakarta, 2012.
- Noordjanah, Andjarwati. *Komunitas Tionghoa Di Surabaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010.
- Oldham, W. F. *Malaysia Nature's Wonderland*. Singapore: Jennings & Graham, 1907.
- Onghokham. *Migrasi Cina, Kapitalisme Cina dan Anti Cina*. Depok: Komunitas Bambu, 2017.

- Onghokham. *Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa*. Depok: Komunitas Bambu, 2017.
- “Orgaan Der Nederlandsche Zendingsvereeniging No.5.” NZV, November 1864.
- Poerwanto, Hari. *Cina Khek Di Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Purcell, Victor. *The Chinese in South East Asia*. London: Oxford University Press, 1965.
- San, Lee Teng. “Begimana Soepaya Bond Kristen Tionghoa Bisa Pakerdjaanja (Organisatienja).” *Maandblad Kristen Tionghoa (THKTKH) Tahun 1 No. 8*, Agustus 1928.
- Setiono, Benny G. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elsaka, 2003.
- Somers, Mary F. *Peranakan Chinese Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University, 1964.
- Suryadinata, Leo. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Suryadinata, Leo. *Politik Peranakan Tionghoa Di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- Suryadinata, Leo. *Tokoh Tionghoa Dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hiem*. Depok: Komunitas Bambu, 2010.
- “Verslag Conferentie Kristen Tionghoa Di Cheribon, Juli 1934.” *Keng Po*. July 17, 1934.
- “Volkstelling Deel I: Inheemsche Bevolking van West Java.” 1933.
- Williams, Lea E. *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of The Pan Chinese Movement in Indonesia, 1900-1916*. Glencoe, IL: The Free Press, 1960.
- Willmott, Donald E. *The Chinese of Semarang*. Ithaca: Cornell University, 1960.
- Willmott, Donald E. *The National Status of The Chinese in Indonesia, 1900-1958*. Ithaca: Cornell University, 1961.
- Wolterbeek, J. D. *Babad Zending Di Pulau Jawa*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1995.